

# IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI UDARA DI DISTRIK MOSKONA UTARA KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

Efradus Orocomna

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

*email: arsyirachman@yahoo.com*

Paper Accepted: 05 Juni 2017  
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017  
Paper Edited: 03-15 Juli 2017  
Paper Approved: 20 Juli 2017

## ABSTRACT

This thesis examine about the Implementation of Air Transportation Infrastructure Development in the North Moskona District, Teluk Bintuni Regency, West Papua Province as a form of elaboration from the Regional Regulation No. 4 of 2012 on Spatial Plan of Teluk Bintuni Regency of 2012 – 2032, as well as the follow up the society aspiration of North Moskona District about the difficulty of fulfill the necessities of life because of the difficulty of accessibility of transportation in isolated area. The purpose of this study is to investigate the implementation of air transportation infrastructure development, as well as find out about the barriers and efforts made by the Regional Government of Teluk Bintuni Regency on the implementation of air transportation infrastructure development in the North Moskona District Teluk Bintuni Regency. The theory used in this research is the theory of policy implementation, policy implementation of Matland model using policy dimension that includes the substance of the policy, executing task behavior, interaction networks, the participation of target groups and resources. The research method using qualitative methods with observation and interview techniques. Results of this research is that the policy implementation of air transportation infrastructure in the North Moskona District not optimal in practice due to the geograpichal conditions as isolated area, the limited number and capacity of officials implementing, limited availability of information and data that is accurate, the budget allocated in stages and limited quantities, and the difficulty of getting the asphalt material led to the implementation of air transportation infrastructure development in the North Moskona District Teluk Bintuni Regency, the provision of subsidies plane experienced problems in scheduling flights in the subsidized plane with funds from the budget of Teluk Bintuni Regency, and the slow process of completing the New Airport development with funds from regional funds (APBD) Teluk Bintuni Regency, and the development of access roads with funding from the state budget (APBN).

*Key Words : accessibility of transportation, the policy implementation, transportation infrastructure.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah berdasarkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Tahun 2012-2032 dijabarkan kedalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat menunjukkan masih adanya beberapa distrik yang terisolir di Kabupaten Teluk Bintuni, yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara dengan menggunakan pesawat udara berbadan kecil, sejenis CESNA yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, yaitu MAF (Mission Aviation Fellowship), dan AMA (Association Mission Aviation).

Kapasitas pesawat jenis tersebut hanya mampu mengangkut 8 - 12 orang penumpang, dan barang seberat 800 - 1300 kg. Selain itu, tarif pesawat untuk satu kali penerbangan dapat mencapai Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta per penumpang, sedangkan jika di carter dikenakan tarif berkisar Rp. 24 juta. Hal tersebut tentunya menjadi kendala bagi masyarakat yang berdomisili di beberapa distrik yang terisolir untuk melakukan perjalanan ke pusat kota, maupun melakukan aktivitas perdagangan menjual hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pokok.

Kesulitan terhadap aksesibilitas transportasi yang dihadapi oleh masyarakat di Distrik Moskona Utara mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dilihat dari terealisasinya pemberian subsidi pesawat, sehingga tarif pesawat dapat dijangkau oleh masyarakat setempat. Kebijakan dalam pemberian subsidi pesawat telah disepakati dan disahkan bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni melalui alokasi anggaran yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 telah mengalokasikan anggaran subsidi pesawat sebesar Rp. 5 Milyar untuk 300 kali penerbangan diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di Distrik Moskona Utara sebanyak 150 kali penerbangan,

dan masyarakat di Distrik Moskona Timur sebanyak 150 kali penerbangan. Pemberian subsidi pesawat ini melibatkan kerjasama dengan pihak perusahaan penerbangan AMA.

Adanya subsidi pesawat, maka masyarakat setempat hanya dikenakan tariff pesawat sebesar Rp. 300 ribu per penumpang, dan barang bagasi dikenakan biaya sebesar Rp. 10 ribu per kilogram, yang dibayarkan dan diatur pembagian jatah penerbangan subsidi pesawat oleh Pemerintah Distrik, khususnya Pemerintah Distrik Moskona Utara untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

Meskipun alokasi anggaran untuk subsidi pesawat telah dikeluarkan, akan tetapi masih terdapat hambatan dikarenakan tidak sebandingnya jumlah subsidi pesawat dengan jumlah warga masyarakat setempat yang ingin bepergian dengan menggunakan jatah penerbangan subsidi pesawat. Apabila masyarakat di Distrik Moskona Utara belum memperoleh jatah penerbangan subsidi pesawat, maka mereka secara berkelompok melakukan perjalanan dengan berjalan kaki selama lebih dari satu minggu untuk menuju pusat kota agar dapat menjual hasil produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Lamanya jarak tempat perjalanan dengan berjalan kaki diakibatkan karena tidak tersedianya angkutan umum, dan akses jalan darat yang tidak dapat menembus langsung ke pusat kota antar wilayah distrik di Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini membawa dampak tingginya harga barang yang mereka jual, seperti harga beras dapat mencapai Rp. 500ribu per karung. Tingginya harga barang yang mereka jual tidak didukung oleh daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pendapatan mereka dan semakin sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pemecahan masalah terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di Distrik Moskona Utara telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama dengan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni pada Daerah Pemilihan (Dapil) Distrik Moskona Utara untuk melaksanakan pembangunan Bandara baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015 pada pembangunan landasan pesawat terbang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50 Milyar. Pembangunan ini bertujuan agar dapat berfungsi sebagai landasan bagi jenis pesawat berbadan lebar, seperti pesawat Susi Air yang dapat

menjangkau distrik terisolir dan dapat menunjang sistem jaringan transportasi di Distrik Moskona Utara. Pelaksanaan pembangunan ini melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta dalam pengadaan barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur berdasarkan UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 disebutkan memiliki dua fungsi yang sangat vital, yaitu Pertama, infrastruktur dapat membuka akses wilayah di kawasan terisolir melalui pembangunan infrastruktur transportasi, dan Kedua, infrastruktur menggenerasi perkembangan wilayah. Apabila kondisi infrastrukturnya buruk, maka akan menghambat perkembangan wilayah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia) dimana Provinsi Papua Barat termasuk dalam koridor VI yang terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya 1) tingkat aktivitas dan sistem pelayanan wilayah, termasuk wilayah terisolir; 2) kondisi fisik lahan tidak memungkinkan dihuni, dan sebagian besar merupakan kawasan hutan; 3) aksesibilitas dan tingkat pencapaian masing-masing wilayah berbeda, beberapa wilayah terisolir sehingga memerlukan biaya transportasi yang cukup besar; dan 4) luas wilayah tiap kabupaten berbeda-beda.

#### **Identifikasi Masalah**

- 1) Minimnya ketersediaan sistem jaringan transportasi darat, sungai dan laut di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni menyebabkan sulitnya masyarakat untuk bepergian ke pusat kota, maupun ke pusat aktivitas perdagangan, sehingga berdampak pada sulitnya memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Tidak adanya aksesibilitas transportasi darat, sungai dan laut untuk menjangkau wilayah terisolir di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, berdampak pada besarnya pengeluaran biaya tarif pesawat terbang yang tidak terjangkau oleh masyarakat setempat.
- 3) Tidak memadainya fasilitas infrastruktur Landasan Lapangan Terbang di Distrik Moskona Utara mengakibatkan hanya pesawat berbadan kecil sejenis CESNA yang dapat menjangkau wilayah terisolir.
- 4) Terbatasnya penyediaan layanan sistem jaringan transportasi udara

mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi mahal, dan hasil produksi pertanian tidak dapat dipasarkan ke pusat kota, maupun pusat aktivitas perdagangan di luar wilayah Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

#### **Pembatasan Masalah**

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.”

#### **Perumusan Masalah**

- 1) Bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat?
- 2) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara
- 3) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat?
- 4) Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat?

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan menjelaskan tentang implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara, dan hambatan apa yang dihadapi serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

#### **Kegunaan Penelitian Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan atau teori ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

## **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dengan menyajikan data objek dan faktual yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah, mencakup pada hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam proses pelaksanaannya, suatu kebijakan seringkali terjadi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan kebijakan tidak dapat dicapai. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya implementation gap, yaitu perbedaan antara yang diharapkan, dan kenyataan yang diharapkan.

Pada implementasi pembangunan infrastruktur di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni tidak terlepas dari implementation gap dilihat dari kondisi geografis yang sangat terisolir sebagaimana kampung-kampung di distrik Moskona Utara dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi sangat mungkin terjadi.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat atau instansi pelaksana. Keadaan ini terjadi sebagai akibat, antara lain adalah badan legislatif menggariskan kebijakan dalam rumusan umum, meskipun kebijakan mempunyai rumusan yang jelas, masih memerlukan berbagai penyesuaian, dan diskresi dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan dari implementasi kebijakan melibatkan berbagai tingkatan struktur pemerintah dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan; pejabat pelaksana di lapangan; dan aktor perorangan di luar badan pemerintahan, yakni kelompok sasaran target.

Terdapat empat faktor yang saling berinteraksi pada kinerja kebijakan dalam implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan, political will, karakteristik kelompok sasaran, dan dukungan lingkungan.

Berdasarkan pada beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan yang mempunyai tujuan/sasaran yang ingin dicapai meliputi pada berbagai macam kegiatan dengan menugaskan badan pelaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tanggungjawab untuk melaksanakan program harus mendapatkan sumber-sumber, meliputi personil, peralatan dan lain sebagainya selain daripada uang. Teori tersebut sejalan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni yang melibatkan antar petugas pelaksana dan berbagai stakeholders dalam kerjasama pembangunan tersebut.

### **Model-Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Vanhorn dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) ukuran dasar dan tujuan kebijakan; (2) sumber kebijakan; (3) karakteristik badan pelaksana; (4) kondisi ekonomi, sosial dan politik; (5) sikap para pelaksana; dan (6) komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan.

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III disebut dengan Direct and Indirect Impact of Implementation terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dipengaruhi oleh (1) kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Model kontingensi Matland dapat menunjukkan variabel implementasi kebijakan, terdiri dari dimensi produktivitas dengan indikatornya dilihat pada jumlah pencapaian kelompok sasaran, dimensi linearitas dengan indikatornya dilihat pada derajat kesesuaian dengan standar meliputi prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana. Sedangkan, dimensi efisiensi indikatornya pada tingkat pendayagunaan

sumberdaya meliputi pelaksana, aset, dan teknologi. Di sisi lain, determinan implementasi kebijakan publik menunjukkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan yang berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya.

Berdasarkan adanya hubungan kewenangan antar tingkatan pemerintah, keterlibatan pihak ketiga, dan ketersediaan sumber daya pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara, maka penelitian ini menggunakan Model Implementasi

Kebijakan Matland sebagai tolok ukur dilihat dari dimensi kebijakan yang mencakup pada substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya.

### **Teori Pembangunan**

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam pelaksanaannya, suatu pembangunan tidak terlepas dari tujuannya, yaitu bangsa (nation building), atau perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan inilah yang sering disebut oleh para cendekiawan sebagai modernisasi.

Unsur-unsur pembangunan meliputi (1) pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan; (2) suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dan terencana; (3) berorientasi pada perubahan dan pertumbuhan yang mengarah pada modernisasi; dan (4) bertujuan pada usaha pembinaan bangsa yang terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan.

### **Pengertian Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada

dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, dan produktivitas, yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karena itu, sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur penting diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Manfaat pembangunan infrastruktur menurut Tjokroamodjojo mencakup pada (1) membuka keterisolasian wilayah; (2) meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran roda ekonomi wilayah; (3) mempermudah akses penggunaan teknologi dan pemanfaat sosial; (4) peningkatan mobilitas dan kontak sosial antar penduduk.

### **Konsep Transportasi**

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kegiatan transportasi akan terjadi apabila dipenuhi beberapa persyaratan, dengan adanya muatan yang diangkut, tersedianya alat angkut yang memadai, dan terdapat fasilitas jalan yang akan dilalui.

Fundamental pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan sistem transportasi adalah mencakup unsur-unsur terdiri dari: (1) pusat kota dalam (hirarki, konfigurasi dan orientasi, jasa distribusi secara geografis); (2) Wilayah pengaruh atau wilayah pelayanan; (3) Jaringan transportasi; dan (4) Orientasi jasa distribusi secara geografis.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dengan melakukan studi lapangan di lokus penelitian yaitu di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup pada data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan berupa buku, jurnal, hasil riset, dokumen, foto, rekaman dan peta.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni

Analisis dalam penelitian ini berdasarkan pada model implementasi kebijakan Matland dilihat dari dimensi yang meliputi substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya.

#### Substansi Kebijakan

Substansi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Hamdi adalah berkenaan dengan konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan, dan keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain yang terkait dengan Kebijakan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 – 2032 yang memiliki keselarasan dengan isi kebijakan lainnya, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Ruang dan Wilayah Provinsi/Kabupaten di Provinsi Papua Barat.

- a. **Konsistensi Derivasi Isi/Spesifikasi Kebijakan**  
Konsistensi kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara merupakan penjabaran dari isi Perda tersebut dalam rangka mewujudkan penataan ruang dan wilayah sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dengan penyelenggaraan program pembangunan wilayah, terutama di Distrik Moskona Utara sebagai wilayah terisolir di Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. **Implementasi pembangunan tersebut mengacu pada aspirasi masyarakat Distrik Moskona Utara tentang sulitnya memperoleh aksesibilitas transportasi karena kondisi geografisnya termasuk salah satu distrik terisolir di Kabupaten Teluk Bintuni.**
- c. **Keselarasan Isi Kebijakan dengan Isi Kebijakan Lain**

Keselarasan substansi kebijakan tata ruang wilayah dengan kebijakan lainnya sangat berkaitan dengan pelaksanaan dari perencanaan program pembangunan wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni, dimana perlu adanya bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15/2010, sehingga Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebelum melaksanakan program pembangunan infrastruktur dasar di setiap kawasan distrik di Kabupaten Teluk Bintuni adalah melakukan suatu tahapan pra pelaksanaan dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, terdapat ketidakselarasan dalam pelaksanaannya ketika RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2005-2010 dibuat hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif yang hanya berdasarkan pada perhitungan secara statistik, namun belum mempertimbangkan aspek kualitatif dari kondisi dan kebutuhan riil yang diharapkan oleh masyarakat sehingga berakibat adanya ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni.

Implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara terkait dengan prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksanaan telah ditetapkan berdasarkan hasil Musrembang yang merupakan penjabaran dari Raperda Kabupaten Teluk Bintuni terkait dengan pengalokasian dan penggunaan anggaran yang harus dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh petugas pelaksana antar instansi pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi bersama dengan Pemerintah Distrik Moskona Utara.

Oleh karena itu, substansi kebijakan menerapkan model implementasi kebijakan Matland dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan dari dimensi perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumberdaya dapat memberikan gambaran dari serangkaian keadaan dan hambatan maupun upaya dalam mencapai keberhasilan pada implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

## Perilaku Tugas Pelaksana

Dimensi perilaku tugas pelaksana sebagaimana dinyatakan oleh Hamdi terdapat tiga indikator yaitu motivasi kerja, kecenderungan penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran. Pelaksana tugas dari implementasi pembangunan transportasi udara di Distrik Moskona Utara adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi bersama dengan Pemerintah Distrik Moskona Utara.

### a) Motivasi Kerja

Motivasi kerja dari petugas pelaksana telah dilakukan upaya dari Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Teluk Bintuni dengan memulai tahap pengerjaannya pada tahun 2015. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi motivasi kerja yang didasari oleh tanggung jawab terhadap tugas pokok yang menjadi bagian kewenangannya yang dimotivasi oleh dilakukannya proses pengerjaan pembangunan infrastruktur transportasi udara, serta pembangunan akses jalan darat dengan melakukan koordinasi antar tingkat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokoknya. Motivasi kerja ditunjukkan oleh petugas pelaksana dari Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Teluk Bintuni, melalui proses pengerjaan pembangunan infrastruktur transportasi udara, dan pembangunan akses jalan darat yang dapat diapresiasi oleh Kepala Distrik Moskona Utara melalui pelaksanaan kerja, dan jalinan komunikasi, serta koordinasi antar tingkat pelaksana, dapat memperlihatkan motivasi kerja yang baik, meskipun harus menghadapi hambatan, berupa sulitnya menjangkau wilayah di Distrik Moskona Utara yang belum dapat ditembus melalui akses jalan darat. Perilaku tugas pelaksana memiliki relevansi dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamdi dimana motivasi kerja sebagai dimensi perilaku tugas pelaksana dapat ditemukan dalam pengimplementasian pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara yang dilaksanakan oleh antar instansi pemerintahan, yaitu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama Pemerintah Distrik Moskona Utara.

### b) Kecenderungan Penyalahgunaan Wewenang

Mewujudkan komitmen untuk pembangunan infrastruktur transportasi udara telah disepakati oleh semua komponen masyarakat yang ada di Distrik Moskona Utara merupakan tujuan yang akan dicapai dalam tahapan pembangunan infrastruktur udara di Distrik Moskona Utara, sehingga dalam pelaksanaan tahapan pembangunan tersebut diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan, agar menghindari adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh para petugas pelaksana di lapangan.

Perilaku petugas pelaksana sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara, karena apabila perilaku yang ditunjukkan oleh petugas pelaksana menunjukkan tidak adanya motivasi kerja, dapat berakibat lambatnya tahapan dalam proses pembangunan tersebut, serta apabila terjadi kecenderungan penyalahgunaan wewenang seperti dalam hal penyalahgunaan anggaran dapat berakibat terhentinya proses pembangunan tersebut.

Adanya unsur dan manfaat dalam pembangunan infrastruktur dapat memperlihatkan pentingnya perilaku petugas pelaksana untuk mengimplementasikannya secara administratif, mencakup pada tugas dan kewenangannya dimana pada pelaksanaan tugas dan kewenangannya adalah berkaitan secara administratif, dalam mengimplementasikan kebijakan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Dilihat dari Model Implementasi Kebijakan Matland dapat diketahui adanya motivasi kerja untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, dengan berkomitmen untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran guna mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi udara sebagai upaya dengan kemampuan pembelajaran dari hambatan yang ditemukan berupa keterbatasan informasi dan data yang akurat dengan melakukan kerjasama antar instansi pemerintah bersama dengan stakeholders yang dilibatkan adalah bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

c) Kemampuan Pembelajaran

Perilaku petugas pelaksana memiliki peran penting untuk melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, melalui komitmen yang telah disepakati oleh semua komponen masyarakat dan stakeholders yang dilibatkan, dalam kerjasama untuk mencapai keberhasilan pada implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni. Proses tersebut dilakukan dengan cara koordinasi antar tingkat pelaksana, yakni Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi melakukan koordinasi kegiatan, dan pembinaan teknis operasional dengan stakeholders atau para pemangku kepentingan yang dilibatkan, hingga dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam tahapan proses pembangunan infrastruktur transportasi udara, dan akses jalan darat di Distrik Moskona Utara diapresiasi oleh Kepala Distrik Moskona Utara melalui pelaksanaan kerja, menjalin komunikasi, dan berkoordinasi dalam mengatasi hambatan di lokasi penelitian dapat diketahui dari kondisi geografis Distrik Moskona Utara yang sulit untuk dijangkau, sehingga menyebabkan terbatasnya penyediaan informasi dan data yang akurat dalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni. Upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan dengan menunjukkan komitmen untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran yang dapat berakibat terhentinya proses pembangunan tersebut.

Komitmen ini telah disepakati oleh semua komponen masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama antar instansi pemerintah di Kabupaten Teluk Bintuni guna mewujudkan terbangunnya Bandara baru, dan akses jalan darat di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni. Dilihat dari Model Implementasi Kebijakan Matland dapat diketahui adanya motivasi kerja untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, dengan berkomitmen untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran guna mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi udara sebagai upaya dengan kemampuan pembelajaran dari hambatan yang ditemukan berupa keterbatasan informasi dan data yang akurat dengan

melakukan kerjasama antar instansi pemerintah bersama dengan stakeholders yang dilibatkan adalah bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

### Interaksi Jejaring Kerja

Dimensi interaksi jejaring kerja terdapat dua indikator sebagaimana dinyatakan oleh Hamdi yaitu mencakup pada indikator kerjasama antar pelaksana, dan hubungan wewenang antar pemerintah.

a) **Kerjasama Antar Pelaksana**

Pada pemberian subsidi pesawat yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan adanya penandatanganan kerjasama dengan perusahaan penerbangan AMA, dimana Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas persetujuan dari DPRD Kabupaten Teluk Bintuni telah menyepakati pemberian subsidi pesawat terbang, dan selanjutnya dalam pengaturan jatah penerbangan bagi setiap warga setempat diatur oleh Kepala Distrik Moskona Utara. Adanya pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Pemerintah Distrik Moskona Utara di bawah tanggung jawab Kepala Distrik, untuk melakukan pengaturan terhadap jatah penerbangan bagi setiap penduduk setempat, dan mengordinasikan dalam pembayaran tarif pesawat yang dibayarkan oleh penduduk, ketika mendapatkan jatah penerbangan adalah menunjukkan adanya interaksi antar jejaring kerja dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah distrik, yang bertujuan memberikan kemudahan akses transportasi udara bagi penduduk setempat di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaan pembangunan Bandara baru di Distrik Moskona Utara terlihat adanya interaksi antar jejaring kerja dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kerja di lapangan. Adanya proses dalam tahapan pembangunan infrastruktur udara di Distrik Moskona Utara dapat menunjukkan adanya interaksi jejaring kerja yang melibatkan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Kepala Distrik Moskona Utara, serta

melibatkan stakeholder lainnya yaitu pihak swasta untuk pengadaan kebutuhan barang dan jasa dalam pembangunan bandara baru di Distrik Moskona Utara, pada tahap awal pengerjaannya mengalami kesulitan karena masih dikerjakan secara manual.

Pelaksanaan tugas pokok pada masing-masing instansi pemerintahan yang melibatkan masyarakat serta pihak swasta sehingga kerjasama antar pelaksana tugas sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamdi pada dimensi interaksi jejaring kerja dilihat dari indikator kerjasama antar pelaksana sangat diperlukan mengingat masih terdapat hambatan berupa kurangnya koordinasi yang dapat meningkatkan dalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

#### **b. Hubungan Wewenang Antar Pemerintah**

Interaksi jejaring pelaksana melalui proses tahapan dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara yang masih dilakukan di Distrik Moskona Utara telah dilaksanakan melalui tahapan survei yang telah dilakukan pada tahun 2009, dan terus dilakukan tahapan pembangunan yang membutuhkan kerjasama antar tingkatan pemerintah, dalam menyikapi adanya kendala dalam pembangunan tersebut, dengan harapan bahwa pada tahun 2017 pemerintah dapat menyelesaikan pembangunan tersebut dengan melakukan pemadatan dan pengaspalan yang menjadi kendala utama saat ini, sehingga di tahun 2018 telah dapat dilakukan uji coba dari pembangunan bandara baru untuk landasan pesawat terbang berbadan besar, seperti Susi Air.

Hambatan yang ditemukan pada dimensi jejaring kerja dapat dilihat dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama dengan Pemerintah Distrik Moskona Utara yang melibatkan berbagai stakeholders pada tingkat koordinasi dan hubungan kewenangan masih terdapat hambatan disebabkan karena kondisi geografis Distrik Moskona Utara sebagai daerah terisolir mengakibatkan sulitnya mendapatkan informasi dan data yang akurat, terutama berkaitan dengan

jadwal penerbangan dari subsidi pesawat terbang.

Hambatan ini sering memunculkan permasalahan pada tingkat koordinasi dan hubungan kewenangan antar instansi pemerintah yang melibatkan perusahaan penerbangan AMA sebagai pihak ketiga ditambah dengan kemampuan petugas pelaksana di tingkat pemerintah distrik dalam mengoperasikan peralatan teknologi dalam sistem informasi penerbangan sehingga perlu ditingkatkan jalinan komunikasi dalam berkoordinasi sehingga kerjasama dapat ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hambatan pada pengerjaan landasan pesawat terbang dan akses jalan darat juga disebabkan karena kondisi geografis Distrik Moskona Utara sebagai daerah terisolir yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan material untuk pengerasan tanah. Hal ini menunjukkan pentingnya interaksi jejaring kerja antar instansi pemerintah yang melibatkan perusahaan kontraktor sebagai pihak ketiga dalam berkoordinasi sehingga tidak menghambat berjalannya proses pembangunan tersebut.

Selain itu, hambatan pada pengalokasian anggaran yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni secara bertahap dan dalam jumlah terbatas mengakibatkan proses pengerjaan pembangunan Bandara baru dan akses jalan darat menjadi lambat. Oleh karena itu, diperlukan interaksi jejaring kerja dimana Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya dapat secara langsung melakukan pengawasan dan pengendalian dalam proses pengerjaan pembangunan tersebut sehingga dapat memberikan keputusan untuk mengalokasikan anggaran dari kebutuhan real yang dibutuhkan dalam pengerjaan pembangunan tersebut.

Pemerintah Distrik Moskona Utara diharapkan dapat menjalin koordinasi dan komunikasi dalam hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan untuk menginformasikan perkembangan dan hambatan dalam proses pengerjaan pembangunan tersebut agar penyelesaian pembangunan Bandara baru dan akses jalan darat dapat diselesaikan secara cepat dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Distrik Moskona Utara terus meningkatkan kerjasama dalam hal koordinasi dan jalinan komunikasi antar tingkat pemerintahan dalam hubungan

kewenangan masing-masing instansi tersebut sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan pembangunan Bandara baru dan akses jalan darat. Upaya tersebut dapat dilihat mulai dari pembersihan lahan untuk landasan pesawat terbang dan akses jalan darat menuju Bandara baru, pengrataaan dan pengerasan tanah dan mengadakan alat berat sehingga pengerjaan tidak lagi dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia.

Dengan demikian, interaksi jejaring kerja perlu meningkatkan kerjasama dalam hal koordinasi pada tahapan proses pengerjaan pembangunan infrastruktur transportasi udara yang melibatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders, serta perlu adanya penegasan kewenangan dalam pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Distrik dikarenakan wilayah Distrik Moskona Utara termasuk daerah terisolir sehingga terbatas pada penerimaan informasi dan data yang akurat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan antar instansi pemerintahan dalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

### **Partisipasi Kelompok Sasaran**

Dimensi partisipasi kelompok sasaran memiliki dua indikator sebagaimana dinyatakan oleh Hamdi yaitu tingkat penerimaan terhadap manfaat dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada.

#### **a) Tingkat Penerimaan Terhadap Manfaat**

Partisipasi kelompok sasaran, terutama pada indikator tingkat penerimaan terhadap manfaat program kegiatan bagi masyarakat di Distrik Moskona Utara yang dapat merasakan dampak dari adanya pembangunan Bandara baru dan pembangunan akses jalan darat yang tentunya dapat menimbulkan suatu kerugian yang dirasakan oleh masyarakat maupun merasakan suatu manfaat adanya tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Masyarakat akan merasa dirugikan jika ganti rugi atas hak ulayat tidak sesuai kerugian yang mereka alami sebagai dampak dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

#### **b) Kemampuan Berkontribusi Sesuai Prosedur yang Ada**

Pada indikator kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada dilihat dari petugas pelaksana harus segera melakukan suatu sikap agar kerugian tidak dialami oleh masyarakat setempat.

Partisipasi kelompok sasaran dalam berkontribusi sesuai dengan prosedur yang ada dalam pembagian jatah penerbangan dari subsidi pesawat sudah diikuti oleh masyarakat secara antrian namun karena ketidakmampuan petugas pelaksana dengan jumlahnya yang sedikit tidak mampu memberikan penjelasan maupun arahan agar masyarakat setempat memahami adanya keterbatasan tersebut. Hal ini berdampak terjadinya salah paham hingga keributan di antara masyarakat.

Untuk biaya tiket pesawat dari subsidi pesawat yang telah diberikan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan jatah penerbangan telah mengikuti aturan mengenai besaran nominal harga tiket yang ditetapkan, serta mengikuti prosedur untuk memperoleh jatah penerbangan. Akan tetapi, petugas masih belum menunjukkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat.

Kontribusi yang diberikan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat setempat yang tinggal di Distrik Moskona Utara telah menunjukkan partisipasi aktif untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ada namun kendala pada keterbatasan jumlah petugas berdampak pada adanya rasa ketidakadilan di masyarakat yang ingin bepergian dengan menggunakan jatah penerbangan dari subsidi pesawat.

Pada pengaturan jadwal penerbangan pesawat bersubsidi masih belum optimal meskipun partisipasi kelompok sasaran khususnya semua masyarakat di Distrik Moskona Utara telah berkontribusi mengikuti prosedur yang ada namun masih merasakan ketidakadilan dalam pembagian jatah penerbangan dari subsidi pesawat.

Pada proses pengerjaan pembangunan Bandara baru telah menunjukkan adanya kontribusi yang diberikan oleh kelompok sasaran dimana semua komponen masyarakat sepakat untuk dilakukannya proses pembangunan tersebut. Akan tetapi, proses pembangunan tersebut masih memunculkan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang mempunyai lahan, tanah maupun pohon yang mempunyai nilai jual dan ketentuan dalam hak ulayat dimana pengaturannya telah ditetapkan bagi dalam pendekatan secara adat.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni maupun DPRD Kabupaten Teluk Bintuni

sebagai penyelenggara dari pemerintahan daerah perlu melakukan sosialisasi maupun kunjungan kerja sehingga dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap tujuan dilakukannya pembangunan bandara baru dan pembangunan akses jalan darat di Distrik Moskona Utara.

Hambatan yang terjadi yaitu masih adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat akibat lahan, tanah dan pohon-pohon yang ditebang sebagai dampak terjadinya proses pengerjaan Bandara baru, serta sulitnya akses jalan darat mengakibatkan masyarakat perlu menempuh perjalanan yang jauh dan lama ke pusat aktivitas kota, serta masih terbatasnya jumlah penerbangan pada jatah subsidi pesawat bagi masyarakat setempat berakibat terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan masyarakat secara individu dengan kepentingan bagi kesehatan, pendidikan dan pemerintahan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik yaitu Pemerintah Distrik melakukan dialog dengan masyarakat setempat yang mengalami kerugian dan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu, Pemerintah Distrik telah berupaya untuk bertindak adil dalam jatah subsidi pesawat bagi masyarakat setempat meskipun belum terjadwal secara teratur akibat terbatasnya jumlah aparat di Pemerintah Distrik Moskona Utara.

Adanya upaya tersebut, maka dapat dilihat partisipasi kelompok sasaran yang dapat menerima manfaat dari jatah subsidi pesawat dan proses pengerjaan Bandara baru dan akses jalan darat. Komponen masyarakat di Distrik Moskona Utara telah sepakat dan berkomitmen terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi udara yang dapat dilihat adanya penerimaan manfaat bagi kelompok masyarakat yang dapat bepergian menggunakan jatah subsidi pesawat untuk menjual hasil bumi mereka ke kota meskipun masih terdapat kendala dari jadwal yang belum teratur sebagai akibat terbatasnya jumlah aparat Pemerintah Distrik Moskona Utara.

Pada kontribusi dari prosedur dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masyarakat setempat telah menerima adanya proses pengerjaan yang telah menjadi komitmen yang disepakati oleh semua komponen masyarakat, meskipun pada tahap pengerjaannya masih berjalan lambat diakibatkan karena kondisi geografis termasuk wilayah yang terisolir, dan alokasi anggaran yang direalisasikan secara bertahap dalam jumlah terbatas.

Dengan demikian, dimensi partisipasi kelompok sasaran dilihat pada penerimaan

manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai kelompok sasaran, dan pada kemampuan berkontribusi telah ditunjukkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat dengan memberikan kesediaan, berdialog dan menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Pencapaian pada dimensi partisipasi kelompok sasaran belum diimbangi dengan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintahan dengan baik dalam mengatasi hambatan, dan kendala pada implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara.

### **Sumber Daya**

Dimensi sumberdaya memiliki lima indikator seperti yang dinyatakan oleh Hamdi yaitu indikator kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi, dan ketepatan teknologi. Dalam hal ini, sumberdaya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya aparatur pelaksana tugas serta ketersediaan anggaran, peralatan, informasi dan ketepatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

#### **a) Kecukupan Dana**

Kecukupan dana menjadi gambaran rangkaian dinamika kebijakan dalam pembangunan tersebut sangat membutuhkan aparatur pelaksana yang memiliki motivasi kerja dan berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenang, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terkait dampak dan manfaat dari adanya pelaksanaan pembangunan tersebut, dan selalu berupaya untuk menyediakan anggaran guna mendukung proses pembangunan bandara baru dan akses jalan darat di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Masih perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan yang kuat guna melaksanakan tahapan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni melalui adanya dukungan dari lembaga legislatif daerah untuk mendukung keberlanjutan tahapan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara dengan tetap memperjuangkan agar dapat memberikan

penambahan alokasi anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan bandara dan akses jalan darat tersebut.

b) Ketersediaan Pelaksana

Indikator dari ketersediaan pelaksana dapat dilihat dari instansi Pemerintah Daerah, terutama Bupati beserta perangkat daerah lainnya tentunya harus dapat memberikan solusi terhadap keterbatasan jumlah aparatur pelaksana tugas yang belum optimal dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

Hambatan pada sumberdaya terutama dari segi jumlah pegawai yang bertugas di Kantor Distrik Moskona Utara yang sering mengalami kekurangan jumlah pegawai untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat, seperti masih terjadinya masalah dari tidak adanya jadwal yang ditentukan secara rutin oleh Pemerintah Distrik Moskona Utara terkait dengan jatah penerbangan subsidi pesawat salah satunya disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai untuk menangani seluruh pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

c) Kecukupan Peralatan

Pada indikator kecukupan peralatan dalam implementasi pembangunan transportasi udara di distrik Moskona Utara, terutama pada pembangunan Bandara baru dan akses jalan darat dapat diketahui adanya peralatan yang mencukupi dengan didatangkannya alat berat di lokasi pembangunan tersebut. Akan tetapi, kecukupan peralatan tersebut masih mendapatkan hambatan dari sulitnya memperoleh material batu dan aspal untuk pengerasan jalan menuju Bandara baru, dan untuk landasan lapangan pesawat terbang.

Kecukupan peralatan yang ada dan digunakan dalam proses pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara masih mengalami hambatan karena kondisi geografis Distrik Moskona sebagai salah satu distrik yang terisolir di Kabupaten Teluk Bintuni.

d) Ketersediaan Informasi

Pada indikator ketersediaan informasi dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara sangat

minim tersedianya informasi dan data yang akurat dikarenakan kondisi geografis Distrik Moskona Utara sebagai daerah yang terisolir.

Ketersediaan informasi sangat dibutuhkan guna mendukung berjalannya proses keberlanjutan pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

e) Ketepatan Teknologi

Pada indikator ketepatan teknologi dalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara masih terkendala kemampuan aparatur pelaksana untuk mengoperasikan peralatan teknologi yang digunakan.

Keterbatasan kemampuan aparatur dalam penggunaan peralatan yang syarat dengan ketepatan teknologi, seperti penguasaan pada peralatan yang dapat menyediakan informasi jadwal penerbangan dalam pengaturan jatah penerbangan bagi masyarakat setempat masih belum optimal dikuasai oleh aparatur pelaksana di lapangan.

Sumberdaya memegang peran kunci terhadap keberhasilan dalam implementasi kebijakan, terutama pada implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi sumberdaya dimana petugas pelaksana seharusnya mampu memberikan keputusan kebijakan dilihat berdasarkan kebutuhan riil bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam mengalokasikan anggaran sehingga proses pembangunan tersebut dapat berjalan lancar.

Selain itu, kemampuan sumberdaya aparatur dalam mengoperasikan peralatan teknologi sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan dari terbatasnya penerimaan informasi dan data akurat yang dapat mendukung proses pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

### **Hambatan yang Dihadapi Dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di Distrik Moskona Utara**

Hambatan pada pelaksanaan dalam pembagian jatah penerbangan dari subsidi pesawat yang telah dialokasikan anggarannya dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bagi masyarakat yang

bertempat tinggal di Distrik Moskona Utara adalah jumlah jatah penerbangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 150 kali penerbangan bagi masyarakat di Distrik Moskona Utara adalah tidak sebanding untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat untuk bepergian dengan menggunakan jatah penerbangan dari subsidi pesawat tersebut.

Pada pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menjual hasil bumi ke pusat kota masih terjadi benturan dengan berbagai kepentingan, seperti kepentingan untuk membawa pasien yang sakit, perjalanan dinas untuk aparat Pemerintah Distrik, kepentingan untuk membawa putraputri untuk melanjutkan pendidikan keluar Distrik berdampak terjadinya keributan di antara kelompok masyarakat.

Hambatan pada pembangunan Bandara baru dan pembangunan akses jalan darat menuju bandara baru masih mengalami hambatan dari sulitnya mendapatkan material aspal untuk pengerasan tanah, realisasi anggaran secara bertahap dan dalam jumlah terbatas mengakibatkan proses pengerjaan pembangunan tersebut menjadi lambat. Selain itu, hambatan ditemui karena masih adanya masyarakat setempat yang mengalami kerugian karena lahan, tanah dan pohon milik masyarakat yang ditebang sebagai dampak dari proses pengerjaan pembangunan tersebut.

#### **Upaya yang Dilakukan Dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di Distrik Moskona Utara**

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Distrik Moskona Utara dari adanya hambatan pada pembagian jatah subsidi pesawat yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk masyarakat yang tinggal di Distrik Moskona Utara adalah meningkatkan jalinan komunikasi dan berdialog dengan masyarakat setempat guna menghindari keributan yang meluas di kalangan masyarakat setempat dengan memberikan prioritas dari berbagai kepentingan secara adil, meskipun bagi sebagian masyarakat masih merasakan kurang adil karena belum dibuatnya jadwal secara teratur untuk jatah subsidi pesawat bagi masyarakat di Distrik Moskona Utara.

Selain itu, Pemerintah Distrik Moskona Utara juga berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat setempat kepada Pemerintah

Kabupaten Teluk Bintuni terkait dengan tidak sebandingnya jumlah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi udara dengan jumlah jatah penerbangan menggunakan subsidi pesawat.

Upaya yang dilakukan pada pembangunan Bandara baru dan pembangunan akses jalan darat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah melakukan pendekatan dan dialog dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, terutama masyarakat yang masih dirugikan akibat dampak dari proses pengerjaan pembangunan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga telah melakukan upaya dengan mendatangkan alat berat guna mempercepat proses pengerjaan pembangunan tersebut namun masih terkendala karena kondisi geografis yang sulit mendatangkan material pengaspalan untuk pengerasan tanah.

Pada pengalokasian anggaran dalam proses pembangunan Bandara baru dan akses jalan darat, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Distrik Moskona Utara terkait dengan pelaksanaan pembangunan dengan pihak ketiga dari perusahaan kontraktor agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dalam merealisasikan kebutuhan anggaran dari proses pengerjaan pembangunan tersebut.

#### **KESIMPULAN**

1. Implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan belum optimal dalam pelaksanaannya karena pada pemberian subsidi pesawat masih terdapat keterbatasan jumlah dan kemampuan aparaturnya untuk pembagian jatah subsidi pesawat kepada masyarakat setempat, dan pengoperasionalan peralatan teknologi terkait dengan penyediaan dan pemberian data dan informasi tentang cuaca yang berguna untuk mengatur jadwal penerbangan pesawat bersubsidi di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni. Pada pembangunan Bandara Baru dan akses jalan darat adalah belum optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan oleh jumlah anggaran terbatas yang dialokasikan

secara bertahap, dan sulitnya memperoleh aspal untuk pengerasan tanah mengakibatkan proses dalam tahapan pembangunan tersebut menjadi lambat

2. Hambatan pada jatah subsidi pesawat dilihat dari kondisi geografis dan kemampuan sumberdaya aparatur, yaitu kondisi geografis Distrik Moskona Utara merupakan wilayah yang terisolir dan kemampuan petugas pelaksana dalam mengoperasikan peralatan teknologi yang menyebabkan terbatasnya informasi dan data yang akurat mengenai jadwal penerbangan sehingga belum terjadwal secara teratur untuk pembagian jatah subsidi pesawat bagi masyarakat setempat berakibat terjadinya keributan di antara masyarakat setempat dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Pada proses pengerjaan pembangunan Bandara baru dan akses jalan darat menuju Bandara baru di Distrik Moskona Utara, yaitu sulitnya mendapatkan material aspal untuk pengerasan tanah, dan alokasi anggaran yang direalisasikan secara bertahap dan dalam jumlah terbatas berdampak pada lambatnya proses penyelesaian pembangunan tersebut. Di sisi lain, ditemui hambatan berupa masih adanya masyarakat setempat yang mengalami kerugian karena lahan, tanah dan pohon miliknya, seperti pohon sagu, pohon buah merah dan sejenis tanaman lainnya yang ikut terkena dampak dari pembangunan tersebut.
3. Upaya ditunjukkan melalui terealisasinya aspirasi masyarakat Distrik Moskona Utara yang mengalami kesulitan dalam aksesibilitas transportasi, yaitu telah dialokasikannya anggaran subsidi pesawat dan anggaran pembangunan Bandara baru yang bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun Anggaran 2014 dan APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun Anggaran 2015. Untuk pembangunan akses jalan darat melalui dana yang bersumber dari APBN.

Upaya lain adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dari perusahaan penerbangan AMA untuk subsidi pesawat, dan perusahaan kontraktor untuk penyediaan barang dan jasa pada proses pengerjaan dengan mendatangkan alat berat dalam pembangunan Bandara baru dan akses jalan darat di Distrik Moskona Utara.

Upaya dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan cara melakukan berbagai pendekatan dan dialog kepada berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi udara di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Dunn, W. (1994). Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (terjemahan), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Bachtiar. (2002). Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.
- Grigg, N. (1998). Infrastructure Engineering and Management. John Wiley & Sons.
- Hamdi, Muchlis. (2014). Kebijakan Publik. Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Islamy, I. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhingan. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, CST. (1984). Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kodoatie, R. J. (2013). Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Korten, D.C. (1984). "Preface" dalam David C.Korten dan Rudi Klaus (eds), *People Centered Development*, Connecticut: Kumarian Press, Hartford.
- Nugroho, I dan Dahuri, R. (2012). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
- Mustopadidjaja. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarta Offset.
- Morlok, Edward. (2011). Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Penerbit: Erlangga.
- Nasution. (2006). Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nugroho, R.D. (2009). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, F. (2003). *Partai Politik & Kebijakan Publik*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Ripley, R and Franklin, G.A. (1986). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood. Illinois: The Dorsey Press.
- Siagian S,P. (1994). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siregar, Binsar Pardamean. (2008). *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Barang Melalui Kereta Api*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Tjokroamidjojo, B. (1985). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2001), *Analisis Kebijakan Publik; Teori dan Aplikasinya*, FIA Universitas Brawijaya Malang.
- Wibawa, S. (1994). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.